

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Pembinaan Terpadu Anak Jalanan di Kota Padang melibatkan beberapa instansi, yaitu Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti. Masing-masing instansi memiliki peran tersendiri, mulai dari penjangkauan, pendataan, pemeriksaan kesehatan, hingga pembinaan fisik dan mental. Namun, pelaksanaannya masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terkoordinasi secara sistematis.
2. Tahap pelaksanaan berjalan sesuai rencana dengan pola pembinaan kedisiplinan militer yang terstruktur. Meskipun kegiatan berjalan lancar, pendekatan ini hanya berfokus pada fisik dan spiritual saja. Aspek psikososial dan keterampilan hidup belum terbagi secara menyeluruh ke semua anak yang dibina. Respon anak jalanan menilai program bermanfaat untuk skala psikososial namun tidak cukup membantu kebutuhan mereka.
3. Kendala utama dalam pelaksanaan program yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, tantangan dalam penjangkauan anak jalanan, serta pola pembinaan yang kurang bervariasi, kurang keterlibatan LSM, dan minimnya durasi pembinaan.

4. Jika dianalisis dengan teori sistem AGIL Talcott Parsons, program ini baru memenuhi sebagian fungsi sistem sosial, seperti adaptasi dan pencapaian tujuan, tetapi masih lemah dalam aspek integrasi dan pemeliharaan nilai.

#### 4.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti memberikan saran bahwa:

1. Penguatan koordinasi antarinstansi, baik secara struktural maupun operasional. Perlu adanya forum atau tim lintas sektor yang rutin mengevaluasi dan menyusun rencana bersama.
2. Meningkatkan Kualitas dan Durasi Pembinaan. Untuk memperdalam proses pembinaan, durasi pembinaan enam hari harus diperpanjang. Untuk membuat anak jalanan lebih siap untuk kehidupan setelah program, materi pembinaan juga harus mencakup elemen psikososial seperti konseling, penguatan mental, dan pelatihan keterampilan hidup.
3. Pelibatan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial memiliki kemampuan untuk bekerja sama secara aktif dengan LSM yang memiliki pengalaman dalam membantu anak-anak yang rentan. Keterlibatan LSM dapat memenuhi kebutuhan yang lebih luas dari anak-anak jalanan dan memperkuat pendekatan berbasis komunitas.
4. Pemerataan sistem tindak lanjut setelah anak selesai mengikuti pembinaan. Misalnya, program pelatihan lanjutan diberikan kepada seluruh anak jalanan yang dibina.